



Sigmund Neumann, menyatakan bahwa partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. (Haryanto, 1984 ; 4).

Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

R.H. Soltau: "Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. (Miriam Budiardjo, 1993; 161).

Dari pengertian di atas, jelaslah bagi kita bahwa partai politik itu bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam suatu negara melalui pimpinan yang dapat mereka andalkan dan mereka pilih.

Dikarenakan partai politik merupakan pusat kegiatan rakyat untuk berpolitik, maka diperlukan suatu organisasi yang benar-benar mantap dan memberikan rasa aman bagi rakyat tersebut di dalam menyalurkan aspirasinya tersebut. Dan karena rakyat dalam suatu negara jumlahnya banyak, maka secara otomatis pula diperlukan adanya partai politik yang lebih dari suatu partai di dalam menyalurkan aspirasinya. Hal ini bertujuan agar rakyat Indonesia dapat memilih suatu partai di dalam menyalurkan aspirasinya sesuai dengan

















yang dinilai bukan banyaknya harta ataupun karena jabatannya, akan tetapi yang dinilai dari manusia itu sejauh mana kebaikan yang dikerjakan dan ketebalan ketaqwaannya serta mantapnya keimanan kepada Allah.

Oleh karena itu maka semua manusia haruslah saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga segala kebutuhannya dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sebaliknya kalau manusia selalu saling menghina dan menyombongkan dirinya maka hubungan antara manusia menjadi macet, yang pada akhirnya menimbulkan perkelahian dan permusuhan yang akan menghancurkan segalanya.

Berdasarkan ayat di atas itulah, maka Islam tidak mengetahui adanya sistem ras dalam masyarakat. Sebab di dalam Islam kedudukan manusia itu sama derajatnya, tidak ada yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam atau lainnya, antara penguasa dengan rakyatnya.

Didalam Islam siapa saja boleh menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara, tidak peduli apakah orang itu pada mulanya orang miskin, asalkan dia memiliki pengetahuan yang luas dan juga memiliki kecakapan, maka orang tersebut dapat dipilih sebagai seorang pimpinan di suatu negara.

### C. ORSOSPOL DALAM ISLAM

Dalam Agama Islam, istilah partai politik sebenarnya tidak ada, karena pada permulaannya Islam berkembang, segala tampuk pemerintahan yang tertinggi berada di tangan Nabi Muhammad. Segala urusan yang menyangkut masyarakat banyak dan jalannya pemerintahan diputuskan oleh Nabi saja, dan semua pengikutnya langsung tunduk dan melaksanakan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka semua sudah tunduk lahir bathin terhadap Nabi, sehingga apapun yang dikatakan Nabi mereka kerjakan dengan segala senang hati tanpa adanya keluhan.

Setelah Rasulullah wafat. Situasi politik Islam menjadi keruh, karena adanya kekosongan kepemimpinan faktor ini disebabkan, karena Nabi tidak secara jelas menentukan penggantinya, maka umat Islam dihadapkan pada kepentingan untuk memecahkan problema mereka sendiri. Langkah ini dilakukan mengingat kedudukan Nabi sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pimpinan masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Penggantian Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pimpinan Islam ini disebut khalifah. ( H. Muhammad Daud Ali. 1993, 151).

Keadaan orang-orang muslim setelah wafatnya Rasulullah mereka sulit mengatur masalah hukum, sedang Rasulullah sendiri tidak menunjuk salah seorang dari sahabat untuk menjadi pengganti beliau sebagai khalifah, tetapi beliau meninggalkan perkara itu kepada orang-orang Muslim untuk memilih siapa yang patut dijadikan khalifah dalam mengatur masalah hukum dalam perkembangan kehidupan mereka.

Akhirnya, terjadilah pertemuan antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor yang terkenal dengan istilah "Pertemuan As-Saqifah", yang mana pertemuan tersebut adalah khusus diselenggarakan untuk menimbang-nimbang siapa yang harus memegang tumpuk kepemimpinan dikalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi saw.

Pertemuan Al Saqifah adalah pertemuan antara golongan Anshor dan golongan Muhajirin yang diadakan di wilayah Bani Sa'idah yaitu suatu tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul dan membahas masalah-masalah umat. Beberapa sarjana menilai, pertemuan itu hakikatnya merupakan majelis konstituante, yang kemudian hari menjadi dasar bagi kehidupan politik umat Islam.

Hasil musyawarah tersebut menghasilkan 3 pandangan: Pandangan pertama dari sahabat Anshar, menurut mereka yang berhak menjadi khalifah adalah dari kalangan mereka sendiri karena mereka telah membantu Rasulullah serta

mempertahankan iman mereka dengan jiwa dan hartanya. Mereka menilai bahwa kaum muhajirin (emigran) telah menerima kebaikan hingga diterima tinggal menjadi penduduk Madinah. Karena mereka tergolong dalam kelompok (A'raht) mereka.

Kedua, pandangan kaum Muhajirin. Pandangan mereka disampaikan oleh Abu Bakar dan menjawab tuntutan kaum Anshar. Beliau sepakat terhadap jasa mereka (sahabat anshar) dan melindungi Rasulullah saw. Juga mereka terus berusaha untuk tetap mempertahankan iman mereka. Namun menurut Abu Bakar sebuah jasa bukanlah alasan yang cocok untuk menuntut hak atas jabatan kholifah. Sebab mungkin sebaliknya kaum Muhajirin bisa membalik dengan mengatakan bahwa kelompok pertama yang terbukti kepada Allah dan merasa satu klan dengan Rasulullah saw. Juga selama ini kaum Muhajirin bersama-sama ikut menderita dan berjuang bersama Rasulullah saw. dalam menghadapi tantangan yang ada. Abu Bakar kemudian mengatakan: Namun dunia Arab hanya mengakui adanya khalifah yang paling tinggi darah kebangsaannya yaitu Quraisy.

Pandangan ketiga dalam pertemuan Al Saqifah itu disampaikan oleh Al-Hubah bin Al-Mundhir dari kaum Anshor, ia berpendapat perlunya dua orang yang sama-sama berkuasa dan memimpin pemerintahan Islam berikutnya. Satu dari golongan Anshar dan satunya dari golongan

Muhajirin, namun pandangan itu ditolak, baik oleh golongan Anshar maupun golongan Muhajirin. ( Muhammad S. El Wa, 1983 ; 50 ).

Setelah mengikuti berbagai pandangan, kemudian bermusyawarah secara terbuka, para peserta pertemuan di Saqifah itu sepakat setuju dan mengangkat sumpah untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin umat dan pemerintahan Islam menggantikan Rasulullah saw.

Pertemuan Al Saqifah itu pada intinya bertujuan untuk menentukan (memilih) seorang pemimpin umat yang baik dalam pemerintahan Islam. Dan berhasil memunculkan Abu Bakar ra. sebagai khalifah, menggantikan Nabi sebagai pucuk pimpinan. Diterimanya Abu bakar, setelah Umar ra. memberikan alasan-alasan bahwa Abu Bakar di samping orang yang paling dahulu di dalam memeluk agama Islam dan paling lama bersahabat dengan Nabi. Juga beliau telah mendapat kepercayaan di dalam menangani segala urusan baik yang menyangkut masalah dunia apalagi masalah akhirat pada waktu Nabi dalam keadaan sakit. Maka kemudian mereka dengan tulus dan juga disetujui oleh semua umat Islam akhirnya mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah untuk memimpin mereka. Itulah awal terjadinya perselisihan antar golongan di dalam masalah politik.

Akan tetapi setelah Abu Bakar ra. wafat, maka

sebagai gantinya adalah Umar ra. Umar Ibnul Khattab ini diangkat oleh Abu Bakar dengan tujuan agar umat Islam tidak terjadi perselisihan lagi di dalam urusan pengangkatan khalifah setelah ditinggalkannya. Dan ternyata Umar Bin Khattab ini diterima oleh umat Islam dengan suara yang bulat. Dimasa Umar inilah jalannya pemerintahan diatur dengan baik, sehingga mencapai puncak keemasan dalam sejarah Islam. Pada masa pemerintahannya, beliau terkenal dengan sikap tolerannya terhadap pemeluk agama lain. Hal ini terbukti ketika beliau hendak mendirikan masjid yang sekarang terkenal dengan masjid Umar di Yerusalem (Palestina) di suatu tempat, yang mana menurut keyakinan beliau Nabi Muhammad dulu Mi'raj kelangit. Karena di dekat itu telah berdiri tempat ibadah orang kristen dan Yahudi, sebelum mendirikan masjid tersebut, Umar terlebih dahulu memberitahukan maksudnya itu dan meminta izin kepada pemimpin agama golongan Kristen dan Yahudi di sana, padahal sebagai penguasa atas seluruh daerah baru itu, ia tidak wajib melakukan hal itu. (H. Mohammad Daud Ali, SH. 1993, 156). Karena masa pemerintahannya, gambaran sistem politik kian jelas. Baik penguasa maupun rakyatnya sama-sama menyadari tentang hak dan kewajibannya. (Mohammad S. Elwa, 1983, 60).

Sepeninggal Umar bin khatthab maka sebagai gantinya

adalah Utsman bin Affan yang ditunjuk oleh panitia pemilihan kholifah. Ketika dipilih, Utsman telah tua dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini dipergunakan orang-orang disekitarnya untuk mengejar keuntungan pribadi, kemewahan dan kekayaan. Hal ini dimanfaatkan terutama oleh keluarganya sendiri dari golongan Umayyah. Banyak pangkat-pangkat tinggi dan jabatan-jabatan penting dikuasai oleh familinya. Maka timbulah konflik sistem dalam pemerintahan. Dan akhirnya kekacauan itu mengakibatkan pembunuhan atas diri khalifah Utsman Ibnu Affan.

Setelah Utsman meninggal dunia, orang-orang terkemuka memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat yang merupakan menantu dari Nabi Muhammad saw. sendiri. Semasa pemerintahannya Ali tidak banyak dapat berbuat untuk mengembangkan hukum Islam, karena negara dalam keadaan tidak stabil. Disana sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok. Timbulnya pemberontakan ini berpangkal pokok karena Ali tidak memberikan hukuman qishas terhadap pembunuh khalifah Utsman. Faktor inilah yang pada akhirnya menimbulkan peperangan antara Ali dengan Muawiyah.

Dalam pertempuran yang terjadi antara kedua



tidak memihak terhadap Muawiyah.

Ketiga golongan di atas itulah yang akhirnya mem-  
permasalahkan Theologi saat ini.

Sebenarnya Islam sendiri tidak mempermasalahkan  
partai politik. Karena partai politik yang diinginkan  
oleh Islam adalah partai yang memperjuangkan masalah-  
masalah yang berkaitan dengan umat. Dan bukan dengan  
tujuan untuk saling menghancurkan. Oleh karena itulah  
maka partai politik yang merupakan wadah aspirasi rakyat  
banyak haruslah memperjuangkan kepentingan rakyat dan  
hal itu merupakan kewajiban bagi partai sebagai bukti  
karena sudah dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk  
mewakilinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Serta  
mengontrolnya apabila ada suatu hal yang menyimpang.  
Sehingga negara yang dikehendaki dan begitu juga  
tujuannya akan lebih jelas sesuai dengan apa yang sudah  
digariskan oleh Islam.